

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

NOTA DINAS
NOMOR 93/ITJ.2/TU.210/IV/2026

Yth : Inspektur Jenderal KKP
Dari : Inspektur II
Lampiran : Satu berkas
Hal : Laporan Kinerja Inspektorat II Triwulan I 2026
Tanggal : 19 April 2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya periode Triwulan I Tahun Anggaran 2026, bersama ini disampaikan Laporan Kinerja Inspektorat II Triwulan I TA 2026 sebagaimana terlampir.

Demikian disampaikan dan mohon arahan lebih lanjut. Atas perhatian dan arahnya diucapkan terima kasih.



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Febry Budianto

Tembusan:
Sekretaris Inspektorat Jenderal



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2026

INSPEKTORAT II

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026 ini disusun sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Selain itu, Laporan ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat II dalam melaksanakan program dan kegiatan pengawasan intern selama Triwulan I Tahun 2026. Laporan ini disusun dari hasil pengukuran kinerja untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat II dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi pengelolaan dan peningkatan kinerja Inspektorat II dan Inspektorat Jenderal KKP.

Jakarta, 17 April 2026
Inspektur II



**Ditandatangani
Secara Elektronik**

Febry Budianto

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat II menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku. Mengingat keterbatasan sumber daya pengawasan yang ada, Inspektorat II harus memfokuskan pengawasan pada hal-hal yang signifikan dan berkaitan erat dengan pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini, pengawasan intern berbasis risiko merupakan pendekatan terbaik yang dapat digunakan untuk menghadapi keterbatasan dan tantangan tersebut. Untuk itu, dalam melaksanakan pengawasan intern, Itjen mengedepankan pengawasan terhadap pelaksanaan fungsi yang memiliki risiko tinggi dan menjadi perhatian publik dan/atau pimpinan KKP.

Pada Triwulan I Tahun 2026 dilakukan pengukuran sebanyak 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut :

- a. IK-3 "Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II" dengan realisasi 86,62% dari target 86% atau capaian sebesar 100,51%.
- b. IK-7 "Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat II" dengan realisasi 100% dari target 100% atau capaian sebesar 100%.

Dengan capaian IKU tersebut, nilai kinerja organisasi Inspektorat II pada periode Triwulan I Tahun 2026 mencapai nilai "Baik" yang ditunjukkan dengan Skor Kinerja pada aplikasi manajemen kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) sebesar 100,36.

Tahun 2026 Inspektorat II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.057.460.000,00. Dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pagu Inspektorat II sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp974.931.264 atau 13,81% dari pagu, dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.082.528.736,00 atau 86,19%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
RINGKASAN EXECUTIVE	ii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. DASAR HUKUM	1
C. TUGAS DAN FUNGSI	2
D. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2025.....	2
BAB II. PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA	4
A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025.....	4
1. Visi Inspektorat Jenderal KKP	4
2. Misi Inspektorat Jenderal KKP	4
3. Tujuan	5
4. Sasaran Strategis	5
B. RENCANA KERJA TAHUNAN	6
C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2026	6
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	8
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	8
B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN	11
1. Realisasi Anggaran Kegiatan.....	11
2. Realisasi Anggaran per Sasaran Kinerja	12
3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi).....	12
BAB IV. PENUTUP	14
A. KESIMPULAN	14
B. PERMASALAHAN	14
C. SARAN	14

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penetapan Kinerja Inspektorat II	6
Tabel 2. Capaian Kinerja Inspektorat II Tahun 2026	8
Tabel 3. Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2026	9
Tabel 4. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026	10
Tabel 5. Realisasi Anggaran masing- masing Sasaran Kinerja per Triwulan I Tahun 2026	12

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat II TA 2026	15
Lampiran 2. Tangkapan Layar Capaian Kinerja Inspektorat II Triwulan II berdasarkan aplikasi kinerjaku.go.id	17

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dari Asta Cita yang telah ditetapkan oleh Presiden dan Wakil Presiden, setidaknya terdapat dua agenda yang terkait langsung dengan peran Inspektorat Jenderal. Agenda tersebut adalah terkait “Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan Ekonomi Biru” (agenda kedua) dan terkait “Reformasi Politik, Hukum dan Birokrasi, serta Pencegahan Korupsi” (agenda ketujuh).

Sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), peran Itjen KKP secara rinci terbagi dalam beberapa fokus yaitu :

1. Mengawal Kegiatan Prioritas KKP
2. Pencegahan korupsi dan *Good Governance*.
3. Evaluasi Pelayanan Publik.

Namun demikian, hal tersebut belum optimal. Masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting. Diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan.

B. DASAR HUKUM

Inspektorat Jenderal KKP melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PERMEN-KP/2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Inspektorat II mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan pengawasan intern, serta penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan perundang-undangan dan administrasi lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) dan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (DJPSDKP), serta seluruh UPT lingkup DJPT dan DJPSDKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Inspektorat II menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup DJPT dan DJPSDKP;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup DJPT dan DJPSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan DJPT dan DJPSDKP;
3. Pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup DJPT dan DJPSDKP, serta seluruh UPT di lingkungan DJPT dan DJPSDKP;
4. Koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan pelayanan publik;
5. Pelaporan hasil pengawasan; dan
6. Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat II.

D. ISU STRATEGIS ATAU FOKUS PENGAWASAN TAHUN 2026

Isu strategis atau fokus pengawasan Tahun 2026 yang diemban oleh Inspektorat II adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup DJPT:
 - a. Reviu Kegiatan Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).
 - b. Pemantauan Proyek *Integrated Fishing Port - International Fishing Market (IFP-IFM) Phase I* Lender JICA dan Lender ADB
 - c. Reviu atas Dokumen Perencanaan *Detailed Engineering Design (DED)* Hasil Pekerjaan *Construction Management Consultant (CMC)* Proyek IFP IFM *Phase I* pada PPN Pengambengan dan PPN Kejawanen.
 - d. Pemantauan Proyek *Outer Ring Fishing Port Development* Lender *Agence Francaise de Development*.
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas Bidang Kelautan dan Perikanan Lingkup DJPSDKP:
 - a. Pemantauan Kegiatan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN) *Maritime Fisheries Integrated Surveillance System (MFISS)*.
 - b. Pemantauan Kegiatan Penanganan Pelanggaran Kelautan dan Perikanan

- c. Evaluasi Kegiatan Operasional Kapal Pengawas.
- d. Evaluasi Kegiatan Operasional Pesawat Patroli.
- 3. Pengawasan Kinerja Manajerial pada Mitra Inspektorat II
 - a. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
 - b. Pelayanan Publik.
 - c. Penjaminan Kualitas Penyelenggaraan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
 - d. Penanganan Benturan Kepentingan.
 - e. Telaah Sejawat.
- 4. Pemantauan Pembangunan Unit Kerja Berpredikat Menuju WBK
- 5. Pemantauan Tindak Lanjut pada Mitra Inspektorat II
- 6. Pengawasan Tematik/Mandatory pada Mitra Inspektorat II
 - a. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L)
 - b. Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa (PA dan PBJ)
 - c. Laporan Keuangan dan Barang Milik Negara (LK dan BMN)
 - d. Laporan Kinerja (LKj)
 - e. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)
 - f. Manajemen Risiko (MR)
 - g. Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RK BMN)

BAB II PERJANJIAN DAN PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2025

Adapun visi-misi Itjen Renstra 2025 – 2029 dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Visi Inspektorat Jenderal KKP

Didasarkan pada visi KKP tahun 2025-2029 yaitu “Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045” untuk mewujudkan visi Presiden Tahun 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini dapat diartikan bahwa KKP mendukung penuh Visi Presiden khususnya dalam hal pembangunan di bidang kelautan dan perikanan. Dukungan KKP dalam bentuk visi tersebut juga menjadi acuan bagi Itjen KKP dalam menentukan arah pengawasan internal selama kurun 5 (lima) tahun pada periode pembangunan jangka menengah tahun 2025-2029.

Sebagai unsur pengawas intern di lingkungan KKP, visi Itjen KKP juga disusun untuk mendukung Visi Presiden secara umum dan Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025-2029. Oleh karena itu dirumuskan Visi Inspektorat Jenderal KKP pada tahun 2025-2029 adalah

**“Terwujudnya Pengawasan Intern yang Andal dan Bernilai Tambah
Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan
Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat
Kelautan dan Perikanan”.**

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai Itjen KKP dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pemerintahan yang berorientasi pada hasil, bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip *good governance* dan *clean government*.

2. Misi Inspektorat Jenderal KKP

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Inspektorat Jenderal merumuskan misi yang mencerminkan mandat dan kegiatan inti pengawasan intern. Misi tersebut menjadi pernyataan Inspektorat Jenderal atas keberadaan, dan tindakan operasional organisasi pengawas intern dalam mencapai visi organisasi. Misi tersebut dirumuskan berupa **“Menyelenggarakan pengawasan intern yang**

profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”.

3. Tujuan

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Jenderal sebagaimana diruraikan di atas, tujuan dari penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP adalah **“Terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan”.**

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja eselon I merupakan Sasaran Program yang menjabarkan kondisi yang harus dicapai atau diwujudkan dalam tataran operasional sebagai ukuran dari tercapainya tujuan. Sasaran Program diukur melalui indikator kinerja yang menjadi ukuran kualitatif atas tercapainya Sasaran Program.

- a. **Sasaran Pertama**, yaitu Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP. Sasaran tersebut merupakan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan pengawasan intern terhadap kinerja organisasi KKP yang diukur melalui indikator kinerja terkait nilai temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, implementasi Reformasi Birokrasi KKP, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP, dan kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Inspektorat Jenderal.
- b. **Sasaran Kedua**, yaitu Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal. Sasaran tersebut menjadi bentuk keseriusan Inspektorat Jenderal dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP. Sasaran tersebut diimplementasikan dengan beberapa ukuran indikator kinerja mengenai kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal, implementasi sistem informasi pengawasan, dan implementasi reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal.

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP pada Tahun 2026, Inspektorat II melaksanakan kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan dengan alokasi anggaran sebesar Rp7.057.460.000,00 yang terdiri dari 2 (dua) Pengawasan Program, yaitu Pengawasan Program Prioritas Nasional/Strategis dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.750.227.000,00, dengan output 4 (empat) Laporan, serta Pengawasan Program Reformasi Birokrasi dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.233.000,00 dengan output 1 (satu) Laporan. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut antara lain:

1. Pengawasan Program Prioritas Nasional/Strategis dengan alokasi anggaran sebesar Rp6.750.227.000,00 terdiri atas:
 - a. Pengawasan Program Kampung Nelayan Merah Putih dengan alokasi anggaran sebesar Rp5.534.277.000,00;
 - b. Pengawasan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap dengan alokasi anggaran sebesar Rp759.969.000,00;
 - c. Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional dengan alokasi anggaran sebesar Rp151.944.000,00;
 - d. Pengawasan Pengembangan *Eco Fishing Port* dan MFISS dengan alokasi anggaran sebesar Rp303.987.000,00
2. Pengawasan Program Reformasi Birokrasi pada Mitra Inspektorat II dengan alokasi anggaran sebesar Rp307.233.000,00.

C. PERJANJIAN KINERJA LEVEL 2 TAHUN 2026

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pengawasan pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2026 sebagaimana disampaikan pada Tabel 1. di bawah ini.

Tabel 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat II TA 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II	≤ 0,50%
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II	86,5%
		3	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk	86%

			perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II	4 Dokumen
2	Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal lingkup lingkup Inspektorat II	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat II	85
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II	80%
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat II	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja dilakukan oleh Tim Pengelola Kinerja Inspektorat II untuk melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala setiap 3 bulan. Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di kinerjaku.kkp.go.id.

Pada Tahun 2026, Sasaran kinerja Inspektorat II terdiri dari 2 (dua) Sasaran Strategis (SS) yang diukur keberhasilan pencapaiannya melalui capaian 7 Indikator Kinerja Utama (IKU). Secara umum dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 telah memenuhi target yang ditetapkan. Nilai kinerja organisasi Inspektorat II pada periode Triwulan I Tahun 2026 mencapai nilai "Baik" yang ditunjukkan dengan Skor Kinerja pada aplikasi manajemen kinerja (kinerjaku.kkp.go.id) sebesar 100,26.

Capaian kinerja ini dapat dilihat sebagaimana Tabel 2. di bawah ini.

Tabel 2. Capaian Kinerja Inspektorat II Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Realisasi	Capaian	Keterangan
1	Pengawasan Intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah	3	Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	86,00%	86,62%	100,72%	Capaian melebihi target
2	Tata kelola pengawasan intern yang akuntabel dan andal lingkup Inspektorat II	5	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat II	100%	100%	100%	Capaian mencapai target

Analisis atas capaian kinerja terhadap IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

SK-1 : Pengawasan Intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah

SK ke-1 "Pengawasan intern yang kapabel dan memberikan nilai tambah" pada Level II didukung oleh 4 (empat) IKU yaitu

1. IKU-1 “Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II”
2. IKU-2 “Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II”
3. IKU-3 “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II”
4. IKU-4 “Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II”.

Pada Triwulan I 2026, dilakukan pengukuran terhadap IKU-3 tersebut dengan gambaran sebagai berikut:

IKU-3 :Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II

IKU ini menggambarkan jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi objek pengawasan.

Rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) ditargetkan sebanyak 86% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

Berdasarkan hasil pengukuran IKU sampai dengan Triwulan I Tahun 2026, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti atau dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja oleh mitra kerja Inspektorat II mencapai 86,62%, dari target sebesar 86% sehingga persentase capaian IKU terhadap target adalah 100,72%. Rincian capaian IKU ini diuraikan pada Tabel 3 di bawah ini.

Tabel 3. Data Rekapitulasi Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup KKP” Triwulan I Tahun 2026

No	Unit Kerja	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	% (Tuntas)	Sisa Rekomendasi	% (sisa Rekomendasi)
1.	Ditjen Perikanan Tangkap	84	63	75,00	21	25,00
2.	Ditjen PSDKP	73	73	100	0	0
	Total	157	136	86,62	21	13,38

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Triwulan I Tahun 2025, IKU capaian Presentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II di Triwulan I Tahun 2026 mengalami kenaikan realisasi sebesar 0,18%, yaitu dari 86,44% menjadi 86,62%. Hal ini menunjukkan bahwa Mitra Inspektorat II (DJPT dan DJPSDKP) menindaklanjuti temuan dengan cukup baik dan pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan oleh Inspektorat II telah dilakukan secara intensif. Secara lengkap perbandingan hasil capaian IKU ini antara Triwulan I 2025 dan Triwulan II 2026 dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Perbandingan Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat II Triwulan I 2025 dan Triwulan I 2026

Indikator Kinerja	Triwulan I 2025		Triwulan I 2026	
	T	R	T	R
Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II	85%	86,44%	86%	86,62%

Keterangan:

R = Realisasi

T = Target

Kegiatan yang dilakukan Inspektorat II untuk mendukung capaian IKU tersebut yaitu Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen pada Ditjen Perikanan Tangkap dan Ditjen PSDKP, Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan Layanan Tindak Lanjut Online melalui Aplikasi SIDAK.

SK-2: Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat II

SK ke-2 "Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat II" pada Level II didukung oleh 3 (tiga) IKU yaitu:

1. Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat II.
2. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II.
3. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Inspektorat II.

Pada Triwulan I Tahun 2026, dilakukan pengukuran terhadap IKU Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran Inspektorat II tersebut dengan gambaran sebagai berikut,

**IKU-7 : Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran
lingkup Inspektorat II**

Suatu ukuran yang menggambarkan pelaksanaan pengelolaan kinerja dan anggaran lingkup Inspektorat yang dijalankan secara tertib dan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengukuran Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja Inspektorat II dilakukan setiap Triwulan terhadap kepatuhan dalam hal kesesuaian format dan ketepatan waktu pelaksanaan aktivitas pengelolaan kinerja dan anggaran.

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan hasil verifikasi oleh Sekretariat Itjen diketahui bahwa Inspektorat II telah memenuhi seluruh dokumen pengelolaan kinerja dan anggaran dengan dengan capaian sesuai target 100,00%. Adapun dokumen tersebut terdiri dari:

- a. Penyampaian Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2026;
- b. Pengisian data capaian kinerja Triwulan I Tahun 2026 pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP;
- c. Monitoring dan evaluasi Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Triwulan I Tahun 2026;
- d. Penyampaian LPJ Keuangan Triwulan I Tahun 2026.

Jika dibandingkan pencapaian IKU ini dengan Triwulan I Tahun 2025, IKU capaian ini realisasi capaiannya sama sebesar 100%.

Untuk Indikator Kinerja Utama lainnya akan dilakukan pengukuran sesuai dengan tahapan target pengukurannya. Saat ini semua masih dalam proses pengukuran untuk tahap selanjutnya.

B. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Dari sisi kinerja keuangan, Inspektorat II mendapat alokasi anggaran sebesar Rp7.057.460.000,00. Dapat disampaikan bahwa realisasi anggaran pagu Inspektorat II sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp974.931.264 atau 13,81%

dari pagu, dengan demikian masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.082.528.736,00 atau 86,19%.

2. Realisasi Anggaran masing- masing Sasaran Kinerja

Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran operasional Inspektorat II dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya Sasaran Strategis dan tujuan. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kinerja (strategis) ltjen Triwulan I Tahun 2026 disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Realisasi Anggaran masing- masing Sasaran Kinerja per Triwulan I Tahun 2026

SASARAN KINERJA	KEGIATAN	PAGU EFEKTIF (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1. Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah	Pengawasan Program KNMP	5.534.277.000	774.608.324	13,99
	Pengawasan Bantuan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	759.969.000	850.000	0,11
	Pengawasan Pengembangan Pelabuhan Perikanan yang Terintegrasi dan Bertaraf Internasional	151.994.000	-	0
	Pengawasan Pengembangan Eco Fishing Port dan MFISS	303.987.000	1.520.000	0,50
2. Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat II	Pengawasan Program Reformasi Birokrasi pada Mitra Inspektorat II	307.233.000	196.380.940	63,92
TOTAL		7.057.460.000	973.359.264	13,79

3. Analisis Kualitas Penggunaan Anggaran (Efisiensi)

Pengukuran kinerja **value for money** pada organisasi sektor publik dapat membuat keseimbangan antara pengukuran hasil dengan pengukuran proses. Indikator efektivitas dalam **value for money** berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisiensi lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif.

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran program pengawasan Inspektorat II di Triwulan I Tahun 2026 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian kinerja organisasi.

Efisiensi Capaian Kinerja *Output* berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Triwulan I 2026 sebesar Rp973.359.264,00 sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,36% dalam menghasilkan *output*.

Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi bila dibandingkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) yang merupakan rata-rata capaian kinerja organisasi Triwulan II 2026, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat II digunakan secara efisien karena dengan *input* anggaran yang lebih kecil 100% dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 100,36%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja organisasi secara keseluruhan (NPSS) sebesar 0,36%.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kegiatan yang mendukung kinerja Inspektorat II Triwulan I Tahun 2026 antara lain:

1. Pengukuran kinerja Inspektorat II periode Triwulan I Tahun 2026 dengan menggunakan aplikasi kinerjaku.kkp.go.id menunjukkan capaian kinerja cukup memuaskan. Hal ini ditunjukkan dengan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 100,36% dan secara umum capaian kinerja Inspektorat II mencapai target, sehingga perlu dipertahankan atau ditingkatkan.
2. Total realisasi anggaran Inspektorat II sampai dengan 31 Maret 2026 sebesar Rp973.359.264,00 atau 13,79% dari pagu sebesar Rp7.057.460.000,00. Dari total realisasi anggaran tersebut dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat II cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang tersedia dapat menghasilkan capaian melebihi dari target.

B. PERMASALAHAN

Pada dasarnya seluruh target Indikator Kinerja pada Triwulan I Tahun 2026 telah terpenuhi dan melebihi target, namun terdapat catatan yang harus diperhatikan, yaitu dalam hal pelaporan hasil pengawasan yang belum seluruhnya tepat waktu dan diunggah ke situs ams.kkp.go.id.

C. SARAN

Untuk mengatasi permasalahan tersebut dan juga untuk mengoptimal capaian IKU Inspektorat II, telah dilakukan arahan kepada para auditor dan staff untuk melakukan percepatan penyelesaian laporan hasil penugasan yang selanjutnya diunggah ke ams.kkp.go.id sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan dan terciptanya tertib administrasi.

LAMPIRAN I. Perjanjian Kinerja Inspektorat II TA 2026



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN INSPEKTORAT JENDERAL

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAR www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026 INSPEKTORAT II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jayeng C. Purewanto
Jabatan : Plt. Inspektur II
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ade Tajudin Sutiawarman
Jabatan : Inspektur Jenderal
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal

Ade Tajudin Sutiawarman

PIHAK PERTAMA
Plt. Inspektur II

Jayeng C. Purewanto

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
INSPEKTORAT II**

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat II	1 Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat II (%)	≤ 0,5
	2 Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat II (%)	86,5
	3 Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat II (%)	86
	4 Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat II (Rekomendasi)	4
2 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat II	5 Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat II (Nilai)	85,5
	6 Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat II (%)	82
	7 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat II (%)	100

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan	7.057.460.000
Total Anggaran Inspektorat II Tahun 2026		7.057.460.000

Jakarta, 12 Januari 2026

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal


Ade Tajudin Sutiawarman

PIHAK PERTAMA
Plt. Inspektur II


Jayeng C. Purewanto

Lampiran 2. Capaian Kinerja Inspektorat II Triwulan I TA 2026 berdasarkan aplikasi kinerjaku.go.id

